

September 2004

## PARADOKS PASAR BEBAS DAN DEMOKRASI DALAM BINGKAI KERESAHAN ETNIS

Annisa E. Budiyani  
global@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

---

### Recommended Citation

Budiyani, Annisa E. (2004) "PARADOKS PASAR BEBAS DAN DEMOKRASI DALAM BINGKAI KERESAHAN ETNIS," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 6 : No. 2 , Article 7.

DOI: 10.7454/global.v6i2.623

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol6/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## *Paradoks Pasar Bebas dan Demokrasi dalam Bingkai Keresahan Etnis*

ANISSA E. BUDIYANI

### Abstract

Many believe that the ongoing process of exporting free-market democracy is the best prescription for multiple ills in the so-called 'under-developed' non-western societies. The combination of free-market principles in economy and free election system of political democracy is believed to bring an ultimate solution lead to global peace, prosperity, as well as stability. These have misled us in a very critical way. Exporting free-market democracy, instead of bringing global peace, prosperity, and justice, has been the source for instability, global resentment, and, moreover, violence. Amy Chua rose up an argument that globalizing free-market democracy has been the source for worldwide group hatred and ethnic violence. It is because in most of non-western societies, live what she calls 'the market-dominant minority', ethnic minorities who, for widely varying reasons, tend under market conditions to dominate economically, often to a startling extent, the "indigenous" majorities around them. Her book has been the story of contradictory relations between those of the 'chosen' few and those of the 'rest of the many'. It explained how free-market system of economic and democratic system of politic tend to benefit different groups, widen the existing gap within society, increase exclusiveness as well as the sense of ethno-nationalism, and thus, bring about global clashes and instability.

---

*World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Hatred and Global Instability*, Amy Chua, (London: Arrow Books, 2004), X + 346 halaman, termasuk indeks.

---

Pasar bebas dan demokrasi telah menjadi ortodoksi global pascakekalah sistem komunis-sosialis. Kombinasi keduanya—khususnya oleh masyarakat Barat—dipercaya sebagai sistem terbaik yang akan mendorong ke arah terciptanya tatanan masyarakat yang dinamis, pluralistik, makmur secara ekonomi, transparan serta bertanggung jawab secara politik. Amerika Serikat (AS) adalah pengusung utama gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan pasar bebas dan demokrasi di tingkat global. Dua deka-

de politik luar negeri AS, baik yang berkarakter formal (antarpemerintah) mau pun informal menunjukkan bagaimana AS senantiasa berupaya menyebarluaskan pemahaman tentang ide-ide pasar bebas dan demokrasi ke seluruh dunia, dengan asumsi bahwa apa yang sudah 'dicapai' masyarakat Barat melalui kedua sistem tersebut akan tercipta pula pada masyarakat-masyarakat lain yang mengadopsi pola yang sama. Dalam jangka panjang, penyebaran ide demokrasi dan pasar bebas bahkan diper-

caya akan membawa pada kemakmuran, perdamaian dan kestabilan global.

Buku ini memberikan peringatan sebaliknya, bahwa para pengusung globalisasi, demokrasi dan pasar bebas telah melupakan satu faktor penting, yaitu etnisitas (*ethnicity*), yang dapat membuat segalanya berbalik arah. Demokrasi dan pasar bebas *tidak* membebaskan dari masalah, bahkan, dalam jangka pendek, merupakan bagian utama dari permasalahan itu sendiri.

Bayangkan jika multimilioner Bill Gates, yang menguasai kekayaan setara dengan 40% populasi Amerika Serikat, dan multimilioner lainnya yang menguasai Time Warner, General Electric, Exxon Mobile, dan simbol-simbol kemakmuran AS lainnya adalah etnis Cina atau warga keturunan lainnya. Kemudian, bayangkan bahwa 75% dari populasi kulit putih AS hidup di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki lahan, dan tidak memiliki akses mobilitas vertikal. Maka, kita akan memperoleh gambaran bagaimana dinamika sosial yang secara ironis tercipta dari penyebaran dan penerapan sistem demokrasi dan pasar bebas pada masyarakat-masyarakat non-Barat.

Tesis utama buku ini menyatakan bahwa kepercayaan dominan masyarakat Barat terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem politik demokratis sebagai preskripsi bagi semua permasalahan keterbelakangan pembangunan adalah keliru. Sebaliknya, penyebaran global dari sistem pasar dan demokrasi, khususnya kepada masyarakat-masyarakat non-Barat, adalah faktor utama yang menyulut timbulnya kebencian kelompok (*group hatred*), kekerasan etnis (*ethnic violence*), dan akhirnya berdampak pada

ketidakstabilan global (*global instability*).

Pembahasan dibuka dengan refleksi empiris penulis buku ini (Amy Chua) terhadap satu kasus kekerasan etnis yang menimpa anggota keluarganya. Seorang wanita keturunan Cina yang bermukim di Filipina menjadi korban perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pembantunya sendiri, seorang pribumi. Meski kepolisian setempat melakukan penyelidikan prosedural atas kasus tersebut, penulis membaca adanya keengganan dan sikap nyaris tidak acuh dari semua pihak yang terlibat. Pernyataan-pernyataan yang muncul kemudian adalah bahwa kejadian serupa sudah nyaris merupakan suatu 'kewajaran', bahwa ratusan etnis Cina setiap tahunnya diculik, dirampok, atau dibunuh, bukan oleh motif-motif kriminal biasa, melainkan motif 'balas dendam' karena 'mereka memiliki lebih banyak uang'. Pembunuhan itu tidak dilatarbelakangi oleh kemiskinan, namun diiringi oleh rasa sakit karena keterhinaan (*indignity*), ketiadaan harapan (*hopelessness*), dan penderitaan (*grievance*) yang diiringi oleh kesadaran akan perbedaan (fisik dan sosial) dengan mereka yang diidentifikasi sebagai orang luar (*outsider*), minoritas, yang telah mendominasi secara ekonomi, dan telah 'mempermalukan bangsa' dengan menjadi makmur di atas tanah air bangsa tersebut.

Fenomena 'minoritas yang mendominasi pasar' (*market-dominant minority*), adalah penghubung logika antara penyebaran global ekonomi pasar dan demokrasi dengan meningkatnya kebencian etnis dan ketidakstabilan. Fenomena ini, yang muncul secara umum pada banyak masyarakat non-Barat, menyebabkan kombinasi penerapan sistem pasar dan demokrasi menjadi kontrapro-

duktif, dan terlepas dari argumen-argumen jangka pendek atau jangka panjang, tidak membuktikan argumen kaum proglobalisasi bahwa ekonomi pasar menciptakan kemakmuran, dan politik demokratis menciptakan keadilan (*fairness*). Sebabnya adalah karena kedua sistem tersebut (pasar dan demokrasi) ternyata memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok etnis yang berbeda, sehingga satu sama lain tidak berjalan padu, melainkan justru menciptakan benturan-benturan dan mempertajam ketidakstabilan.

Ringkasnya, sistem ekonomi pasar *bukan* menyebarluaskan kemakmuran secara merata atau memakmurkan keseluruhan masyarakat yang sedang berkembang, melainkan memperkuat konsentrasi kemakmuran kepada sedikit jumlah/minoritas nonpribumi (*outsider*) hingga mempertajam kesenjangan dalam distribusi kemakmuran (*wealth disparities*) dengan mayoritas pribumi. Sebaliknya, sistem demokrasi, *bukan* mendukung efisiensi pasar atau menciptakan efek-efek pendukung kemakmuran, melainkan memberikan ruang kepada banyak jumlah (mayoritas) untuk menekan minoritas sekaligus mempertajam dan menyebarluaskan sentimen-sentimen eksklusivitas, etnonasionalisme, dan antipasar.

Argumen ini tergambar pada dua bab utama dalam buku ini. Dalam bagian pertama, "*The Economic Impact of Globalization*", penulis menggambarkan fenomena-fenomena minoritas yang mendominasi pasar di Asia Tenggara, Amerika Latin, Rusia, dan Afrika, dan bagaimana globalisasi semakin memperkuat keberadaan fenomena-fenomena ini. Pada bagian berikutnya, "*The Political Consequences of Globalization*", ia menggambarkan reaksi-reaksi penolakan

yang muncul sebagai akibat dari ruang yang diberikan oleh sistem demokrasi kepada perekonomian-perekonomian yang di dalam masyarakatnya memiliki fenomena tersebut. Di bagian terakhir, "*Ethnonationalism and the West*", penulis mengajak pembaca untuk melihat bagaimana sebenarnya demokrasi dan pasar bebas berkembang di Barat, dan apakah sistem ini memang secara ideal berhasil berjalan bersamaan. Bab selanjutnya dari bagian ini menunjukkan bahwa potensi bahaya dari persebaran demokrasi dan pasar bebas tidak hanya mengancam negara-negara non-Barat, namun justru berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dan Eropa sendiri sebagai pelaku utama persebaran. Terakhir, penulis menarik kesimpulan dan pandangannya terhadap apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari dampak-dampak negatif penyebaran sistem ekonomi pasar dan demokrasi tersebut.

\*\*\*

Fenomena minoritas yang mendominasi pasar digambarkan muncul dalam berbagai varian, sesuai dengan latar belakang sejarah, pola interaksi dan nilai, serta karakteristik dari masing-masing etnis yang terlibat. Di Asia Tenggara, dominasi ekonomi minoritas etnis Cina sudah dapat dilacak sejak akhir abad ke-13 di beberapa pusat-pusat kebudayaan seperti Kerajaan Tabanan, Bali, atau Perbukitan Au Lac di Vietnam Utara. Sejak masa-masa tersebut, etnis Cina sudah menguasai porsi kemakmuran yang jauh melampaui mayoritas pribumi (1% populasi menguasai 90% total kemakmuran ekonomi). Yang menarik dari fenomena minoritas Cina di Asia Tenggara adalah interaksinya dengan 'etnis ketiga' yang muncul sebagai akibat gelombang koloni-

alisme di wilayah tersebut. Etnis Cina hampir selalu menjadi 'elit lapisan kedua' yang mengambil keuntungan dari sistem pasar kolonial dengan berperan sebagai pendukung ekonomi bagi elit lapis pertama (kolonialis) yang mendominasi secara politis. Upaya semacam ini nampaknya berlanjut hingga masa-masa awal pembangunan pascakolonialisme; di mana minoritas Cina yang mendominasi pasar senantiasa 'bergandengan tangan' dengan penguasa politik pribumi, yang ironisnya berlangsung dalam bingkai kolusi dan tetap meninggalkan mayoritas pribumi lainnya dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Di Amerika Latin, pemisahan identitas antara mayoritas pribumi dengan minoritas nonpribumi (yang juga mendominasi pasar) tidak sejelas yang terjadi di Asia Tenggara karena derajat percampuran etnis dan perkawinan antarras di wilayah ini jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat-masyarakat non-Barat lainnya. Pola-pola dominasi minoritas di wilayah ini terpusat pada keluarga-keluarga elit kulit putih (*Spaniard*) yang mencapai kemakmuran dengan model yang berbeda dari model pencapaian kemakmuran minoritas Cina di Asia Tenggara. Persamaan dari kedua fenomena ini adalah tetap terdapatnya gambaran kesenjangan, yaitu antara mayoritas etnis Afrika dan Indian-Amerika yang miskin dan terbelakang dengan sedikit jumlah etnis pendatang yang menguasai proporsi kemakmuran luar biasa. Meski dalam latar belakang budaya percampuran etnis, dominasi ini tetap dipertahankan dengan melakukan perkawinan elitis di antara mereka sendiri. Seperti halnya minoritas Cina, kalangan ini juga memperoleh hak-hak politis istimewa dari hasil hubungan kolusi dengan penguasa.

Di Rusia, fenomena minoritas yang mendominasi pasar terwakili oleh apa yang populer disebut sebagai *the seven oligarch*; tujuh industrialis dan bankir yang menguasai ekonomi Rusia. Fenomena ini menarik, selain karena porsi kemakmuran yang dikuasai dan bagaimana kemakmuran ini diperoleh, juga karena enam dari tujuh penguasa ekonomi ini adalah bangsa Yahudi atau keturunan Yahudi. Sangat menarik ketika penulis berulang kali menekankan betapa sulitnya ia memperoleh data akurat dari penelitiannya tentang *the seven oligarch*, karena pembicaraan tentang etnis Yahudi selalu dianggap sangat sensitif dan dibayang-bayangi oleh sejarah panjang diskriminasi terhadap ras tersebut. Tidak terkecuali di Rusia, selama berabad-abad, berbagai kebijakan dan sikap anti-Semit dikembangkan baik oleh pemerintahan (kekaisaran maupun sistem komunis), maupun masyarakat Rusia secara umum. Pada akhir abad ke-18, misalnya, dikeluarkan kebijakan yang isinya mengisolasi domisili warga Yahudi ke wilayah-wilayah "*the Pale of Settlement*", yang praktis mensterilkan kota-kota besar seperti Moscow, St. Petersburg, Warsaw, dan Kiev dari ras Yahudi. Upaya pemiskinan bangsa Yahudi selama berabad-abad ini tentunya menjadi kontras dengan kemunculan fenomena *the seven oligarch* tadi.

Di Afrika, minoritas yang mendominasi pasar muncul sangat beragam dengan karakter yang berbeda-beda, mulai dari bekas kolonialis Eropa, bangsa Libanon dan Indian, hingga minoritas suku tertentu yang berhasil menguasai pasar. Karakter politik, sosial, dan budaya kawasan ini sendiri sedemikian kompleks, sehingga karakter fenomena minoritas yang mendominasi pasarnya pun sangat kompleks dan beragam.

Penulis memberi catatan khusus tentang keterkaitan antara periode kolonialisasi yang sangat panjang di wilayah ini dengan tumbuhnya minoritas yang mendominasi pasar. Kolonialisme di Afrika adalah penyebab langsung dari terciptanya fenomena minoritas yang mendominasi pasar, tidak hanya karena seringkali bangsa kolonialis (dan/atau keturunannya) itulah yang akhirnya menjadi penguasa pasar, namun juga karena kolonialis, dengan strategi pemecah belahnya, telah menciptakan segregasi etnis (berikut sentimen-sentimen negatif yang menyertainya) dan perlakuan-perlakuan diskriminatif yang membuat satu ras tertentu memiliki akses lebih daripada etnis-etnis lainnya.

Minoritas yang mendominasi pasar dalam buku ini dianalisis sebagai variabel penghubung yang tergeneralisasi. Penulis, misalnya, tidak masuk ke dalam perdebatan mengenai etika kewirausahaan yang inheren dalam tata nilai etnis tertentu atau mengaitkannya dengan bentuk kepercayaan atau religi. Penggambaran kasus per kasus tidak menggunakan pisau analisis khusus, penulis sepertinya membebaskan diri untuk masuk ke dalam perspektif yang beragam dan berupaya merangkum semua dimensi-dimensi yang unik pada setiap kasus.

Sorotan penulis terhadap etnisitas sebagai sudut pandang dalam meninjau kapitalisme global dan demokrasi merupakan satu poin tersendiri. Umumnya, kritikus kapitalisme global cenderung menyoroti potensi destruktif ekonomi pasar dari sisi ketidakadilan distribusi kemakmuran pada kelas yang berbeda, baik dalam komunitas suatu masyarakat negara-bangsa, maupun dalam komunitas global.<sup>1</sup> Sebagian lain me-

lihatnya sebagai fenomena *institusi*, antara negara, korporasi, dan masyarakat/*civil society*. Robert Paehlke, misalnya, malah melihat bahwa globalisasi dan pasar bebas cenderung memberi efek 'menyeragamkan budaya' bukan mempertajam identitas etnis. Ia melihat bahwa telah terjadi evolusi masyarakat global, dari *craft society* (yang berpusat pada komunitas-komunitas skala kecil), ke *mass industrial society* (yang berpusat pada tingkatan negara-bangsa), menuju *electronic society* (yang berskala global, dengan pemain utama industrialis media dan pemain-pemain pasar kapital). Menurut Paehlke, potensi konflik tidak muncul dari *clash* yang dipicu oleh ketidakadilan sistem, melainkan ada pada apa yang disebutnya sebagai ketidakseimbangan dari pengaturan '*the three bottom line*': *economic prosperity*, *social well-being*, dan *environmental through-puts*, yang lebih mengacu pada kesalahankelolaan atau ketidakpaduan antar-institusi.<sup>2</sup> Penulis-penulis populer, seperti Noreena Hertz atau David C. Korten mengkritik kapitalisme dan globalisasi karena memberikan ruang terlalu besar kepada institusi-institusi pasar (korporasi), sehingga membuat tanggung jawab dari institusi ini tidak lagi dituntut/dapat dikontrol oleh institusi yang lain.<sup>3</sup> Buku Amy Chua ini menjadi menarik, karena ia 'menyeberangi' batas-batas yang umum di atas dan menunjukkan bahwa sistem pasar bebas memberikan perlakuan yang berbeda, tidak hanya kepada individu yang berbeda, institusi yang berbeda, atau kelas yang berbeda, namun juga pada *etnis* yang berbeda.

Namun penekanan terhadap etnisitas dan hubungannya dengan penguasaan ekonomi menjadikan tesis buku ini tidak jauh berbeda dengan penekanan-penekanan yang dibuat oleh penulis-penulis kritik glo-

balisasi lainnya. Itu terlihat ketika penulis menghubungkan fenomena minoritas yang mendominasi pasar dengan efek globalisasi. Sama dengan penulis-penulis berperspektif kelas lainnya, penulis melihat bahwa globalisasi memperburuk situasi karena faktor *'path-dependence'*, yaitu perbedaan akses modal yang tidak seimbang secara terstruktur. Faktor ini membuat mereka yang sudah kaya (memiliki akses tinggi terhadap modal) otomatis akan menjadi pihak yang semakin diuntungkan, sementara mereka yang miskin (tidak memiliki akses modal) tidak dapat bersaing dengan yang sudah kaya, dan mobilitas kelas tetap tidak dapat terjadi.

Bagaimana proses globalisasi berpengaruh terhadap fenomena minoritas yang mendominasi pasar? Sylvia Ostry dari University of Saskatchewan, dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa tonggak sejarah globalisasi dimulai pada saat tercapainya kesepakatan Putaran Uruguay September 1986.<sup>4</sup> Sejak saat itulah, prinsip-prinsip perdagangan yang mengutamakan kebebasan arus modal antarnegara diintensifkan. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa globalisasi, dalam pengertiannya sebagai sebuah proses pengaliran modal dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin, sudah berlangsung jauh sebelum itu. Dalam buku ini tidak disebutkan dengan jelas acuan dari konsep *'globalisasi'* itu sendiri, apakah mengacu pada suatu era tertentu atau proses tertentu. Dalam beberapa bagian, penulis seolah-olah mengidentikkan globalisasi dengan mulainya era deregulasi ekonomi 1980-an, ketika pemerintah di banyak negara non-Barat mulai mempraktikkan kebijakan-kebijakan reformasi pasar, privatisasi, dan penggalakan investasi. Di lain bagian, diperoleh kesan bahwa glo-

balisasi, bagi penulis, lebih merupakan proses persebaran ide secara global, dan bukan menandakan suatu tahapan (*milestone*) yang berimplikasi terhadap perubahan tertentu. Penulis, misalnya, mengaitkan globalisasi dengan proses penyebaran ide eksklusivitas etnis dan ketidaksukaan (*resentment*) terhadap etnis lain melalui media dan teknologi. Jadi, kemungkinan besar, menurut penulis, globalisasi tidak hanya merupakan satu momentum yang menandakan dimulainya era pasar bebas dan kapitalisme global, namun juga proses-proses persebaran ide, yang tidak mengacu pada suatu referensi periode tertentu. Globalisasi adalah proses ketika ide-ide pasar bebas serta ide-ide demokrasi disebarluaskan secara global. Proses-proses inilah yang secara ekonomi menyebabkan pembesaran peran dari minoritas yang mendominasi pasar, memberikan akses yang semakin besar pada kepemilikan modal, dan semakin memperbesar jurang kemakmuran dengan mayoritas. Dalam buku ini digambarkan bagaimana globalisasi memberi efek yang berbeda kepada dua jenis industri yang sepiintas terlihat sama-sama sederhana: industri tempe dan industri pakan ternak. Globalisasi memberi efek negatif kepada pertanian kedelai (yang dikelola oleh pribumi), karena produk mereka harus bersaing dengan kedelai impor, sementara karakter dari industrinya sendiri masih sangat tradisional dengan lingkup pasar terbatas. Sebaliknya, industri pakan ternak (yang dikelola oleh minoritas yang mendominasi pasar) justru dapat mengambil keuntungan dari proses globalisasi, yaitu melalui pemanfaatan teknologi, penjualan pada pasar-pasar internasional, diversifikasi usaha (dengan merangkul mitra-mitra seperti *7-Eleven*, *Kentucky Fried Chicken*, *Honda*, *Wal-Mart*, dan sebagainya), dan penge-

lolaan bisnis bersama dengan pemerintah dan asing.

\*\*\*

Lalu apakah hubungan antara minoritas yang mendominasi pasar dengan penyebaran nilai-nilai demokrasi? Dalam logika sederhana, solusi politik terhadap sentimen (ekonomi) minoritas yang mendominasi pasar adalah 'lebih banyak demokrasi'; penghargaan terhadap nilai-nilai pluralistis, hak asasi manusia, perlindungan terhadap minoritas, serta kontrol dan pengawasan (*check and balance*). Nyatanya, penerapan sistem demokrasi secara 'tiba-tiba' (*overnight*) tidak serta-merta menciptakan masyarakat yang terbuka dan memiliki kesadaran warga negara (*citizenship*). Bayangkan, masyarakat (mayoritas) yang selama periode yang panjang mengalami frustrasi akibat kecemburuan, keterhinaan, dan ketiadaan harapan tiba-tiba memperoleh akses untuk meluapkan ketidakuasannya melalui suatu proses politik yang sah. Penulis mengangkat kasus-kasus terpilihnya pemimpin-pemimpin secara demokratis, tetapi ironisnya kemudian menjadi 'tidak demokratis' dengan secara oportunistis memanfaatkan sentimen etnonasionalis untuk meraih legitimasi mayoritas. Presiden Robert Mugabe yang memerintah Zimbabwe sejak pemilihan umum demokratis 1980 menjadi populer karena kebijakan perampasan tanah (*land-seizure*)-nya yang didasarkan pada sentimen terhadap kepemilikan lahan oleh minoritas kulit putih. Mugabe dipilih oleh mayoritas rakyat Zimbabwe karena janji politik-nya untuk mengembalikan tanah Zimbabwe yang 'dicuri' oleh 'orang asing kulit putih' kepada masyarakat pribumi. Janji tersebut, dan praktik-praktik penyitaan lahan sebagai konseku-

ensinya, terus mengantarkan Mugabe dan partai Zanu PF-nya memenangkan setiap pemilu demokratis, bahkan ketika dukungan finansial dari minoritas dan pihak-pihak propasar lainnya mengalir kepada oposisi. Jelas bahwa Mugabe mengambil manfaat dari sentimen mayoritas terhadap minoritas yang mendominasi pasar dan dari sistem demokrasi yang memberi penyaluran terhadap suara mayoritas tersebut. Hasilnya, bukan sebuah pemerintahan yang mewakili nilai-nilai demokrasi yang terpilih, melainkan pemerintahan yang menganiaya prinsip-prinsip pasar bebas dan mengakomodasi (bahkan menyulut) kebencian kelompok dan mendukung kekerasan etnis.

Demokrasi, dalam hal ini khususnya pemilihan umum dengan hak pilih untuk semua orang (*universal suffrage*), telah membuka akses kepada bentuk-bentuk perlawanan (*backlash*) yang muncul akibat persaingan dalam perebutan suara dan dalam upaya mempertahankan kekuasaan. Menurut penulis, ada tiga bentuk perlawanan yang muncul dari penerapan sistem demokrasi pada masyarakat dengan minoritas yang mendominasi pasar. Yang pertama adalah perlawanan terhadap pasar (*backlash against market*), yaitu bentuk perlawanan yang ditujukan kepada prinsip-prinsip pasar bebas. Bentuk perlawanan ini terjadi di Zimbabwe era Mugabe, di Indonesia pasca-Soeharto, dan di Venezuela era Hugo Chavez, dalam format penyitaan hak milik yang ditargetkan kepada etnis tertentu (*ethnically targeted seizures*), dan nasionalisasi. Seperti yang terjadi di Zimbabwe, di Indonesia pasca-Suharto, terjadi 'redistribusi' besar-besaran dari kepemilikan dan kontrak-kontrak yang semula menjadi hak minoritas etnis Cina kepada mayoritas (pribumi). Presiden Habibie yang memerintah ka-



la itu, memotong dominasi pengusaha Cina dalam sektor industri pangan dengan membatalkan kontrak-kontrak distribusi beras dan mengalihkannya kepada pengusaha-pengusaha pribumi yang *notabene* hampir tidak mengerti apa-apa mengenai seluk-beluk distribusi beras. Hasilnya, terjadi krisis pangan yang diakibatkan oleh kesalahkelolaan, inefisiensi, dan korupsi dalam skema distribusi beras tersebut. Meski demikian, retorika anti-Cina dan antipasar terus berlanjut, hingga beberapa pengusaha Cina (yang tergolong paling makmur) meninggalkan Indonesia berikut dengan US\$ 100 miliar pelarian modal. Jelas, kebijakan ini telah merugikan pasar, namun tetap dijalankan sebagai akibat berlangsungnya proses demokrasi di mana mayoritas suara pemilih mendukung kebijakan antiminoritas yang mendominasi pasar.

Perlawanan bentuk yang kedua (*backlash against democracy*), menyerang langsung prinsip-prinsip demokrasi, dengan mengambil format 'perselingkuhan' antara pemimpin politik (yang lahir dari sistem demokrasi) dan minoritas yang mendominasi pasar, dalam bentuk kroni kapitalisme. Contoh yang diangkat adalah kerja sama Presiden Sierra Leone, Siaka Stevens, dengan minoritas kapitalis Lebanon di negara tersebut, di mana '*shadow alliance*' di antara mereka memungkinkan pihak minoritas Lebanon memperoleh akses luar biasa terhadap kekayaan alam permata di negara tersebut, sementara presiden memperoleh pembelian suara (*buy-vote*) dan perlindungan politik yang kemudian melanggengkan kekuasaannya. Hal yang serupa terjadi dalam kerja sama antara Presiden Soeharto di Indonesia dan Ferdinand Marcos di Filipina, dengan pengusaha-pengusaha Cina,

yang juga melanggengkan kekuasaan mereka dengan menggunakan perlindungan ekonomi dari minoritas yang mendominasi pasar. Versi lebih ekstrem dari kroni kapitalisme terjadi seperti pada sistem *apartheid* di Afrika Selatan, di mana minoritas itu sendiri akhirnya memperoleh kekuasaan politik dan menggunakannya untuk mempertahankan dominasi ekonomi mereka.

Bentuk perlawanan yang terakhir menyerang dengan bentuk yang lebih mencekam; perlawanan terhadap minoritas etnis yang mendominasi pasar itu sendiri (*backlash against market-dominant minorities*) dalam bentuk pembantaian (*genocide*) dan pengusiran (*expulsions*). Fenomena-fenomena inilah yang terjadi di bekas negara Yugoslavia, Rwanda, dan pada etnis Yahudi di Rusia. Di Rwanda, misalnya, terjadi pemusnahan suku Tutsi oleh suku Hutu, melalui pembantaian dan kampanye 'revolusi sosial' yang memusnahkan 800 ribu lebih suku Tutsi. Pembantaian ini secara ironis dimungkinkan oleh dilangsungkannya pemilihan umum demi pemilihan umum yang mengizinkan mayoritas suku Hutu (80% dari total populasi) memenangkan kursi kekuasaan dan melanjutkan proses-proses pemusnahan etnis tersebut.

Seperti halnya ketika mengangkat fenomena globalisasi dan pasar bebas, penulis tidak memberikan acuan yang *rigid* terhadap konsep 'demokrasi'. Namun berkebalikan dengan penekanan terhadap aspek prinsip/nilai dalam globalisasi, ketika mengaitkan dengan demokrasi, penulis mengacu pada aspek prosedur, yaitu tepatnya mengacu pada proses pengambilan keputusan oleh mayoritas dalam sistem demokrasi melalui pemilihan umum. Dalam perspektif Schumpeterian, demokrasi dengan

prinsip *'the will of majority'* dan *'popular sovereignty'* memang memiliki potensi *abusive*, mengingat mayoritas pemilih diasumsikan berada *'di luar'* (*remoted from*) urusan-urusan dan pengetahuan-pengetahuan publik sehingga tidak memiliki *'sense of reality'*, sensitif terhadap pengaruh-pengaruh nonlogis, dan dalam kondisi tersebut, *'any attempt at rational argument only spurs the animal spirit'*.<sup>5</sup> Namun tidak itu saja, demokrasi *'by popular vote'* mengisyaratkan terjadinya perebutan pengaruh, manipulasi dan konstruksi ide, serta kedekatan uang dan kekuasaan lewat praktik-praktik *'pembelian'* suara. Meskipun dalam demokrasi sendiri masih banyak terdapat proses-proses lain (misalnya proses konstitusional dalam prinsip *rule of law*), patut diakui bahwa proses pemilihan umum adalah proses terpenting dalam sistem demokrasi, dan karenanya argumen buku ini yang mewaspadaikan demokrasi *'by popular vote'* menjadi masuk akal.

\*\*\*

Apakah dengan demikian kombinasi antara penerapan sistem pasar bebas dan sistem demokrasi memang lebih bersifat kontra-produktif daripada sebaliknya? Tidakkah selama ini terbukti bahwa masyarakat Barat yang mengadopsi kombinasi dari kedua sistem tersebut telah meraih kemakmuran dan *'bebas'* dari fenomena minoritas yang mendominasi pasar?

Dalam bagian akhir, penulis memberi argumen menarik bahwa meskipun tidak atau belum terdapat fenomena minoritas etnis yang mendominasi pasar di, katakanlah, Amerika Serikat, selalu terdapat instabilitas inheren (*inherent instability*) dalam penerapan kombinasi sistem pasar dan demokrasi.

Sebabnya adalah karena meskipun tidak terdapat faktor kebencian etnis, akan selalu terdapat potensi konflik antara *'kemakmuran yang dikuasai oleh sedikit'* (*wealth held by the few*) dan *'kekuasaan yang dikuasai oleh banyak'* (*power held by the many*). Selama ini, Barat terhindar dari konflik berskala besar bukan karena berhasil menerapkan kombinasi kedua sistem di atas secara ideal, melainkan justru karena selama ini Barat menerapkan kedua sistem tersebut secara *tidak* ideal.

Pada fase-fase awal penerapan kombinasi sistem pasar dan demokrasi, Barat justru tidak menerapkan konsep pemilihan umum dengan hak pilih untuk semua orang (*universal suffrage*). Pada akhir abad ke-18 di AS misalnya, pemilih miskin secara tidak langsung *'dibuat agar tidak menggunakan hak pilihnya'* (*being disenfranchised*) dalam pemilu, dengan cara menerapkan peraturan-peraturan khusus (seperti syarat-syarat kepemilikan) yang membuat mereka enggan menggunakan haknya sebagai pemilih. Barat juga tidak sepenuhnya menerapkan konsep-konsep pasar bebas. Dalam derajat yang *'halus'*, Barat justru menerapkan konsep-konsep *welfare state*, dengan membangun mekanisme-mekanisme *'redistribusi'* seperti penerapan pajak, membangun program-program *social safety net*, program perlindungan kesehatan, pengangguran, pendidikan gratis, dan sebagainya. Kedua hal ini justru tidak ikut dipromosikan dalam persebaran ekonomi pasar demokrasi di tingkat global, di mana yang diagungkan adalah prinsip *fair election* dan *laissez-faire* total.

Selain karena pelaksanaan tidak ideal dari sistem, kombinasi pasar dan demokrasi di Barat berlangsung dalam konteks budaya

dan institusi yang jauh berbeda dengan masyarakat non-Barat, dan tentunya tidak dapat ditransfer begitu saja. Di Amerika Serikat, masyarakat miskin kulit putih justru lebih merasa 'dekat' dengan Bill Gates atau George W. Bush daripada dengan 'sesama masyarakat miskin' dari etnis Afro-Amerika atau Hispanik. Perasaan ini tumbuh karena faktor kultural yang rumit, terkait dengan tersosialisasinya ide '*American Dream*', sejarah rasisme AS, dan budaya filantropi di negara tersebut.

Oleh sebab itu, penulis kemudian mengemukakan argumen yang lebih menarik, bahwa 'kemunafikan' penyebaran global ide pasar bebas dan demokrasi justru menempatkan Barat, khususnya Amerika Serikat sebagai pelaku utama penyebaran, dalam posisi berbahaya. Amerika Serikat sendiri boleh dikatakan sebagai *minoritas yang mendominasi pasar dalam konteks global*. Dengan GDP sebesar US\$ 9 triliun, ditambah dominasi korporasi multinasional bermerk AS di seluruh dunia, AS adalah populasi minoritas yang menikmati porsi kemakmuran lebih besar dari mayoritas penduduk dunia lainnya. Seperti minoritas yang mendominasi pasar di tingkat individu negara, AS juga menjadi sasaran kecemburuan dan dalam derajat tertentu, kebencian. Bahkan sebelum terjadinya peristiwa 11 September, anti-Amerikanisme telah menyebar luas di segala penjuru dunia. Serangan 11 September sendiri merupakan sebuah respons terhadap fenomena AS sebagai *global market dominant minority*. Ia adalah sebuah tindakan 'balas dendam' oleh 'si lemah yang tertindas' terhadap 'si kuat yang menindas', yang dimotivasi oleh ketertindasan dan ketiadaan harapan.

Terakhir, penulis memberikan beberapa

pandangannya mengenai masa depan demokrasi pasar bebas. Sebagaimana telah digarisbawahi sebelumnya, penerapan prinsip demokrasi *bersamaan* dengan pasar bebas ternyata dapat mengundang perlawanan terhadap pasar itu sendiri. Apakah berarti keduanya tidak seharusnya berjalan beriringan?

Bagaimana pun, ternyata, menurut penulis, penyelesaian masalah tidak pada mengeliminasi ide pasar bebas atau kembali pada sistem otoritarian. Tidak juga pada mendahulukan pasar bebas atas demokrasi, atau sebaliknya. Dengan asumsi bahwa, (1) sistem ekonomi dengan pasar sebagai penggerak utama pertumbuhan, bahwa, (2) sistem politik demokrasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal merupakan 'harapan terbaik' bagi masyarakat *post-authoritarian*, dan, bahwa, (3) pokok permasalahan terletak pada fenomena minoritas yang mendominasi pasar, penulis menawarkan empat 'kemungkinan' solusi.

*Pertama, leveling the playing field*, yaitu mengupayakan persamaan kesempatan antara mayoritas dan minoritas dengan menangani penyebab-penyebab mendasar terdapatnya fenomena minoritas yang mendominasi pasar. Solusi ini adalah solusi jangka panjang, dengan, misalnya, mengupayakan akses pendidikan yang lebih besar kepada mayoritas yang miskin, atau mengurangi favoritisme yang selama ini terdapat dalam hubungan antara pemerintah dengan minoritas elit. Solusi ini memiliki kelemahan karena seringkali penyebab mendasar dari fenomena minoritas yang mendominasi pasar sudah sulit dilacak karena melewati berbagai evolusi sepanjang sejarah. Juga, solusi ini memerlukan waktu yang lama, transgenerasi, dan membutuh-

kan derajat stabilitas tertentu untuk bisa secara realistis berjalan. Karenanya, menurut penulis, solusi ini tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya pemecahan.

*Kedua, spreading the benefits of market*, yaitu mengupayakan agar keuntungan dari pasar dapat dinikmati oleh jumlah *beneficiaries* yang lebih besar, dengan redistribusi, pemberian hak milik legal kepada masyarakat paling miskin, pemberian akses kepemilikan saham, dan program intervensi aktif untuk pemerataan (lazim disebut dengan istilah 'kebijakan *affirmative action*'). Solusi kedua ini juga memiliki kelemahan, karena hanya akan berhasil dengan asumsi bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan adalah agen yang adil dan tidak memiliki bias etnis. Meski dalam beberapa contoh praktik penerapan solusi ini cukup berhasil, penulis juga menyarankan agar ia tidak berjalan tunggal, dan dilakukan dengan kewaspadaan.

*Ketiga, mengakomodasi penerapan demokrasi dengan konsep 'against hypocrisy and beyond majority rule'*, yaitu menjadikan demokrasi lebih dari sekadar konsep kekuasaan mayoritas, dan menyadari bahwa penerapannya tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Ini dapat dilakukan dengan, misalnya, menerapkan terlebih dahulu konstitusi yang menjamin hak-hak minoritas. Tentu hal ini pun hanya dapat diterapkan jika negara yang bersangkutan sudah terdapat institusi dan penerapan hukum yang sehat.

*Terakhir*, yang menurut penulis paling ideal sekaligus realistis, adalah, penyelesaian di tangan kaum minoritas yang mendominasi pasar sendiri. Merekalah yang seharusnya '*taking the lead against ethnonationalism*': ber-

upaya secara inovatif menanggulangi etno-nasionalisme melalui pembentukan tindakan bersama (*collective action*), gerakan-gerakan amal sukarela (*voluntary generosity*), dan upaya-upaya untuk tidak menjadi eksklusif dengan sekitar (mayoritas). Ini dilakukan misalnya, melalui pembentukan 'asosiasi pengusaha minoritas' yang bertugas mengontrol atau menjadi pengawas moral untuk mencegah terjadinya praktik-praktik menyimpang dengan penguasa, melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan masyarakat yang efektif dan jangka panjang, dan melakukan 'perbaikan citra' dengan perilaku lebih simpatik kepada masyarakat sekitar. Solusi ini tentu berada pada tataran kesadaran sikap dan perilaku, tidak mudah untuk begitu saja digiatkan. Meski demikian, menurut penulis, cara inilah yang paling realistis sekaligus akan membawa dampak yang paling efektif.

\*\*\*

Sensitivitas etnis (dengan konotasi yang mungkin serupa dengan 'sensitivitas jender') memang seharusnya dimiliki oleh masyarakat global dewasa ini, mengingat panjangnya sejarah kebencian antaretnis yang sudah kita lalui. Apapun kekuatan dan kelemahan sistem yang menjadi arus utama saat ini, solusi di tingkat unit-unit terkecil, sebagaimana yang disarankan dalam buku ini, setidaknya memberikan pencerahan kepada pembacanya, bahwa tidak perlu menunggu untuk memulai langkah-langkah integratif untuk mencegah meluas dan berkembangnya kekerasan-kekerasan dengan motivasi kebencian etnis. Misi penyadaran (*sobering*) yang dibawa oleh buku ini nampaknya cukup berhasil, terlepas dari beberapa keraguan seputar kedalaman konseptual, legitimasi metodologi, maupun kritik

terhadap bias etnis penulis sendiri. Penulis sepertinya mengesampingkan batasan-batasan level analisis (ia masuk ke beberapa kasus dengan metode yang berbeda-beda kemudian menarik kesimpulan umum di level yang lebih tinggi), tidak masuk ke dalam pendalaman konsep, dan dalam beberapa bagian menunjukkan bias keberpihakan (terlihat ketika misalnya penulis berargumen mengenai peristiwa 11 September. Bagaimana pun, penulis memiliki 'sensitivitas etnis' sebagai keturunan Cina yang berdiam dan menjadi warga negara Amerika Serikat). Namun hal-hal tersebut sama sekali tidak mengurangi nilai kekayaan refleksi-refleksi empiris dan gaya tutur yang menarik, sehingga membuat buku ini layak menjadi referensi bagi target kalangan yang sangat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Held, David. 1996. *Models of Democracy*. 2<sup>nd</sup> edition. Cambridge: Polity Press.

Hertz, Noreena. 2001. *The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy*. New York: Free Press.

Korten, David C. 1999. *The Post Corporate World: Life after Capitalism*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publ and Kumarian Press.

Paehlke, Robert C. 2003. *Democracy's Dilemma: Environment, Social Equity, and the Global Economy*. Cambridge: MIT Press.

Setiawan, Bonnie. 2001. *Menggugat Globalisasi*. Jakarta: INFID dan IGJ.

### Situs Internet

<http://www.utoronto.ca/cis/timlin.pdf>

## CATATAN BELAKANG

<sup>1</sup> Lihat misalnya dalam Bonnie Setiawan, *Menggugat Globalisasi*, (Jakarta: INFID dan IGJ, 2001).

<sup>2</sup> Robert C. Paehlke, *Democracy's Dilemma: Environment, Social Equity, and the Global Economy*, (Cambridge: MIT Press, 2003).

<sup>3</sup> Lihat Noreena Hertz, *The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy*, (New York: Free Press, 2001) dan David C. Korten, *The Post Corporate World: Life after Capitalism*, (San Fransisco: Berrett-Koehler Publ and Kumarian Press, 1999).

<sup>4</sup> Sylvia Ostry, "Globalization and Nation-State: Erosion from Above", [www.utoronto.ca/cis/timlin.pdf](http://www.utoronto.ca/cis/timlin.pdf), Timlin Lectures, University of Saskatchewan, February 1998.

<sup>5</sup> David Held, *Models of Democracy*, 2<sup>nd</sup> ed, (Cambridge: Polity Press, 1996), hlm. 177-182.